

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pusat kesehatan masyarakat ialah suatu lembaga pelayanan di bidang *helathy* kependudukan yang sudah mempunyai otonomi, dengan demikian orang-orang yang bekerja Puskesmas diuntut guna menyediakan jasa layanan terbaik melalui keefektifan manajemen. Efektifitasnya mampu di tandai melalui relevansi serta keabsahan *report finance* yang wajib di sajikan manajemen pada orang-orang yang membutuhkan *report finance* atau laporan keuangan. Suatu rangkuman daripada adanya kegiatan pergerakan keuangan yang berlangsung selama tahun pembukuan sering diistilahkan sebagai laporan keuangan , menurut (Ramadhan, 2015). Sedangkan dalam penyelenggaraan upaya-upaya pembangunan dalam macam-macam sektor makin tumbuh besar. Banyak sector yang melakukan perlombaan guna mengoptimalkan kualitas dari segi layanan untuk kepentingan publik serta mengoptimalkan produktivitas baik di sector swasta bahkan pemerintahan.

Dalam menunjang lancarnya aktivitas sehari-hari lembaga nirlaba di perlukan harta tetap pada tiap-tiap aktivitasnya, sebab harta mempunyai peran yang amat penting untuk lembaga nirlaba. Lembaga nirlaba tersebut dibawah tanggung jawab pemerintah yang pastinya mengarah terhadap aturan-aturan di pemerintahan yaitu aturan pemeliharaan harta tetap serta bila lembaga tersebut dinyatakan menyandang status Badan Layanan Umum (BLU). Harta ialah suatu kepemilikan nominal yang pastinya di kuasai oleh *company* dimana didapatkan dari kegiatan di waktu lampau, yang diinginkan daripada adanya pendapatan harta itu *company* akan

memperoleh dampak ekonomi di masa depan, (Effendi, 2015). Mengutip dari (Yusuf, 2014) harta digolongkan menjadi 2 yaitu harta tetap serta harta lancar. Yang dimaksud harta lancar ialah harta yang biasanya berupa kas serta sumber-sumber ekonomi yang lain dimana bisa dicairkan berwujud kas, bisa dilakukan penjualan bahkan habis pemakaiannya dengan batas tempo 1 tahun.

Lain halnya dengan harta tetap ialah harta yang mempunyai wujud yang dipergunakan kedalam aktivitas *company* serta tak ditujukan guna dilakukan penjualan dengan agenda aktivitas *company* yang stabil. Kewajiban ialah suatu keharusan *company* yang muncul sebagai dampak daripada aktivitas di waktu lampau dimana proses selesainya dimohon menyebabkan arus keluar dari sumber kekuatan *company* yang berisi manfaat-manfaat dalam ekonomi. Lain lagi dengan ekuitas ialah hak residual atas harta *company* sesudah di kurangi seluruh kewajibannya, (Sitorus, et., al. 2012). Secara umum aset tetap dapat berupa bangunan, tanah, kendaraan, mesin, peralatan dan lain-lain. Harta tetap tak bisa difungsikan terus-terusan sebab mempunyai pembatasan tempo pemakaian khusus sehingga kapanpun tak akan mampu digunakan kembali.

Menurut (Sadondang, 2015) menyatakan bahwa harta mempunyai serta dipergunakan oleh *company* guna melancarkan suatu aktifitas kesehariannya perusahaannya, seperti kas, piutang usaha, persediaan, perlengkapan, sewa, asuransi, peralatan, bangunan, tanah, kendaraan, serta harta yang lainnya. Seluruh harta mampu diklasifikasikan pada 2 group yaitu harta lancar serta harta tetap. Satuannya yang memiliki kemampuan perolehan yang begitu pesat dengan bentuk penghasilan yang didapatkan dari layanan yang dilakukan, dipersilahkan untuk menjadi

Badan Layanan Umum. Pemeliharaan *finance* Badan Layanan Umum di laksanakan sesuai implementasi bisnis yang normal, sama halnya yang di laksanakan pada *private sector*.

Mewiraswastakan pemerintah juga disebut sebagai paradigma baru. Fungsi pokoknya untuk penerapan praktek yang sehat serta mengelola sumber kekuatan yang di miliki ialah dalam agenda meningkatkan suatu layanan, (Ariyati, 2016). Pemberlakuan akuntansi pada harta tetap yang tidak tepat dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) memberi dampak pada sajian *report finance*. Harta tetap dapat dilakukan penilaian maupun pencatatan yang begitu besar mempunyai dampak pada angka penyusutan, dimana angka penyusutan akan sangat besar hingga menyebabkan keuntungan menjadi sangat kecil. Namun sebaliknya, bila harta tetap mempunyai penilaian yang amat kecil berdampak pada penyusutan yang dilaksanakan menjadi kecil juga, dengan begitu keuntungan menjadi amat besar (Masipuang, 2015) dan (Weygandt, *et.,al.* 2012)

Ditinjau dari pentingnya peran daripada harta tetap guna melengkapi keseharian *company*, baiknya dilaksanakan analisis perlakuan akuntansi harta tetap yang terdapat di teori yang di pelajari juga kondisi lapangan. Guna melancarkan aktifitas keseharian lembaga nirlaba, di perlukan harta tetap pada tiap aktifitasnya. Maka dari itu harta amat penting untuk lembaga nirlaba. Untuk kelembagaan nirlaba di bawah tanggung jawab pemerintahan pastinya mengarah pada aturan-aturan pemerintahan yaitu aturan gubernur dalam pemeliharaan harta tetapnya. Bilamana lembaga pemerintahan menyandang status BLU, dengan begitu pemberlakuan harta tetapnya mengarah pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 serta menjadi satuan pekerjaan perangkat

daerah landasan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07.

Pengelolaan harta tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 ialah pemberlakuan akuntansi harta tetap yang didalamnya terdapat pemberiakuan harta tetap, pembentukan total, pembebanan, rugi penurunan nilai, pelaporan serta pertanggungjawaban pada saat diakui bisa menghasilkan dampak-dampak yang ekonomis, lain halnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 menegaskan bila pemeliharaan harta tetap tergolong dalam pengakuan, pengukuran, pengeluaran, penyusutan, penghentian serta pengungkapan (Ariyanti, 2016). Satuan kerja yang memiliki kemampuan perolehan yang begitu pesat dalam wujud penghasilan daripada layanan yang dilaksanakan, di perkenankan guna menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

Pemeliharaan *finance* Badan Layanan Umum (BLU) diselenggarakan sesuai praktek bisnis sehat, persis halnya yang diselenggarakan privat sektor. Barunya paradigma tersebut merupakan sebuah mewiraswastakan pemerintah. Hal pokok yang dituju penerapan praktek bisnis sehat serta memelihara sumber kekuatan yang di miliki ialah dalam agenda meningkatkan suatu layanan, (Ariyati, 2016). Pada Peraturan Pemerintah No.23 Th.2005 pasal 26 ayat (2) ditegaskan bila satuan kerja Badan Layanan Umum melaksanakan akuntansi serta penyerahan *report finance* tepat dengan Standar Akuntansi Keuangan yang dilayankan oleh perkumpulan profesi akuntansi Indonesia. Badan Layanan Umum seharusnya tetap memberi *report finance* yang tepat dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam kegiatan konsolidasi *report finance* Kementerian Negara. Demikian di karenakan walaupun satuan kerja Badan Layanan Umum dapat dipersamakan dengan *enterprise*, akan tetapi

Badan Layanan Umum ialah bagian dari Kementerian Negara atau Lembaga yang menghasilkan layanan terhadap para penduduk hingga akhirnya dana serta pemberian *report finance* nya selalu di kendalikan dengan ketat oleh kelembagaan, (Ariyati, 2016).

Pedoman teknis laporan *finance* Badan Layanan Umum Daerah menggunakan pedoman Standar Akuntansi Keuangan No.16 (Wild, *et., al.* 2014) sedangkan pengelolaan dan laporan *finance* Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 (Sitorus, 2015) Di akhir waktu kedua *report finance* itu dibuat menjadi suatu *report* keuangan konsolidasi demi keperluan yang konstituen. Sama dengan pemeliharaan serta penyerahan laporan harta tetap atas Puskesmas Taman dimaksudkan guna memelihara serta keperluan dalam pembuatan *report* keuangan yang wajib adanya akomodir 2 standar akuntansi. Terdapat rangkuman ketidaksamaan yang menunjang dari latar belakangnya pengkajian ini, maka dari itu penulis sangat memiliki ketertarikan guna melakukan pengkajian mengenai implementasi akuntansi harta tetap serta ketepatannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 puskesmas Taman.

Menyesuaikan dengan latar belakang di atas, penulis memutuskan untuk melakukan suatu pengkajian serta mengangkat sebuah judul mengenai **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA PUSKESMAS TAMAN KABUPATEN SIDOARJO”**.

1.2 Rumusan Masalah

Ditinjau dari banyaknya penjelasan maupun uraian tentang latar belakang suatu permasalahan, penulis memustuskan guna merumuskan suatu permasalahan yang ada diantaranya :

- 1.2.1 Bagaimana Penerapan Akuntansi Aktiva Tetap Dalam Hal Pengakuan, Pengukuran Serta Pengungkapan Pada Puskesmas Taman?
- 1.2.2 Apakah Penerapan Akuntansi Aktiva Tetap Berupa Tanah, Gedung, Mesin Serta Inventaris (Komputer) Pada Puskesmas Taman Sudah Sesuai Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16?

1.3 Tujuan Penelitian

Maksud dari adanya pelaksanaan pengkajian ini ialah beberapa rumusan kalimat dimana memperlihatkan terdapatnya beberapa hal yang didapatkan dari sesudah adanya pengkajian. Beberapa tujuan yang mampu disampaikan pada pengkajian kali ini ialah :

- 1.3.1 Guna Melihat Penerapan atau Implementasi Akuntansi Aktiva Tetap Dalam Hal Pengakuan, Pengukuran Dan Pengungkapan Pada Puskesmas Taman.
- 1.3.2 Guna Melihat Penerapan atau Implementasi Akuntansi Aktiva Tetap Berwujud Tanah, Gedung, Mesin serta Inventaris Pada Puskesmas Taman Sudah Tepat Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Akademis

Pengkajian tersebut dimohon mampu dijadikan sebagai sumber referensi untuk para peneliti lainnya dalam mengembangkan penelitiannya di bidang akuntansi *finance*.

1.4.2 Aspek Praktis

1. Aspek Bagi Puskesmas

Pengkajian ini sangat diharapkan mampu memberi bantuan pada membantu orang-orang di Puskesmas untuk dijadikan bahan pertimbangan ketika menerapkan harta tetapnya. Baik itu menjadi pengukuran harta tetap ataupun pengakuannya. Serta dimaskudkan untuk menjadikannya bahan masukan dalam *company* tentang lebih maupun lemahnya akuntansi harta tetap yang diterapkan. Tak lupa di harapkan mampu memberi bantuan pada perusahaan-perusahaan guna menjalani suatu *problem* pada harta tetap atau aktiva tetap di lain waktu maupun di waktu yang akan tiba.

2. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Pengkajian ini akan sangat bermanfaat untuk perihal penambahan suatu ilmu pengetahuan serta pandangan-pandangan tentang problematika yang sedang dikaji paling penting membahas tentang implementasi harta tetap, baik dari sudut pandang pengakuan Atau pun ukuran harta tetap di titik obyek yang dilakukan penelitian. Peneliti begitu mengharapkan hasil dari pengkajian ini mempunyai manfaat menjadikannya referensi bacaan serta literatur guna memperluas wawasan mengenai implementasi harta tetap serta mampu difungsikan

menjadi alat pertimbangan teruntuk penelitian berikutnya dengan kesamaan suatu permasalahannya.

3. Sebagai penambahnya suatu wawasan serta pengetahuan teruntuk penulis tentang pengakuan serta pengungkapan harta tetap dengan cara aplikatif ataupun teoritis
4. Menjadikannya tambahan wawasan ilmu pengetahuan serta landasan dalam melaksanakan studi berikutnya di waktu yang akan tiba.